

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum

1. Pengertian Peran

Dokumentasi KBBI mengartikan peran sebagai pola perilaku normatif yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di tengah masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, peran dipahami sebagai bentuk tindakan nyata yang diekspektasikan dari seorang individu yang memegang posisi tertentu di lingkungan sosial ataupun dalam sebuah lembaga. Menurut pandangan Suhardono dalam kajian ilmu sosial, peran bertindak sebagai fungsi yang melekat pada diri seseorang ketika ia menduduki status struktural tertentu. Oleh karena itu, penempatan seseorang pada suatu jabatan tertentu menjadi stimulan yang membuatnya mampu dan wajib mengeksekusi tanggung jawab serta fungsinya.¹⁹

Pada dasarnya, peran merujuk pada segala aktivitas atau tindakan yang dijalankan oleh seseorang. Peran ini menjadi bentuk ikhtiar yang dilakukan secara berkesinambungan agar hasil yang diperoleh sejalan dengan target yang dicita-citakan. Dalam konteks organisasi, peran dipahami sebagai tanggung jawab formal yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 17

melekat pada individu dan telah dievaluasi oleh otoritas terkait. Posisi strategis ini menuntut individu tersebut untuk berkontribusi aktif, baik melalui sumbangsih ide, pencurahan tenaga, hingga dukungan materi, sehingga ia mampu mengeksekusi pekerjaannya sesuai dengan standar yang diharapkan.

Riyadi mengemukakan bahwa peran merupakan gambaran atau panduan tindakan yang dibawakan oleh seseorang sesuai dengan status sosialnya. Melalui peran tersebut, seorang pelakubaik secara personal maupun kolektif akan bertindak memenuhi harapan masyarakat atau lingkungan kerjanya. Selain itu, peran juga dipahami sebagai tuntutan struktural yang mencakup nilai-nilai norma, ekspektasi, serta kewajiban tertentu. Keberadaan peran pada dasarnya mencerminkan pola perilaku yang lahir dari rumpun jabatan tertentu, di mana faktor kepribadian individu ikut menentukan bagaimana tugas tersebut dieksekusi. Atas dasar tersebut, orientasi peran yang dijalankan oleh manajer lini atas, menengah, hingga bawah pada prinsipnya memiliki kesamaan esensi..²⁰

2. Kepala Sekolah

Terminologi kepala sekolah pada dasarnya terdiri atas dua kata dasar, yakni "kepala" dan "sekolah". Istilah "kepala" diartikan sebagai pemimpin tertinggi di suatu lembaga atau organisasi,

²⁰ Gusianova, B. P, *Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Kecurangan Pemilu 2019 Di Sercut Sei Tuan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023).Hal. 10

sementara "sekolah" merupakan wadah yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Secara substantif, kepala sekolah diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang dipercaya menakhodai suatu instansi pendidikan, tempat berlangsungnya proses instruksional serta ruang bertemunya interaksi akademis antara guru selaku pemberi pelajaran dan siswa sebagai penerima pelajaran.²¹

Merujuk pada dokumentasi KBBI, istilah kepala sekolah diartikan sebagai seorang guru yang memimpin suatu sekolah. Dari batasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kepala sekolah ialah individu atau pendidik yang dipilih untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan formal. Sementara itu, pandangan dari Wahdjosumidjo mengutarakan bahwa kepala sekolah merupakan guru profesional dengan tugas tambahan memimpin instansi persekolahan, yang berfungsi sebagai ruang bertemunya interaksi akademis antara pendidik yang mentransfer ilmu dan peserta didik yang menyerap pelajaran.

Menurut pandangan Wahdjosumidjo, kepala sekolah sejatinya merupakan seorang tenaga fungsional guru yang memikul tugas kepemimpinan di instansi sekolah tempat proses belajar mengajar berjalan, sekaligus wadah bertemunya interaksi antara guru selaku pemberi materi dan siswa sebagai penerima

²¹ Cut Lisnawati & Dr. Teuku Salfiyadi. *Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Kreativitas Guru* (Bandung: Penerbit NEM, 2023), 14

pelajaran. Di sisi lain, Daryanto memberikan batasan bahwa kepala sekolah adalah figur atau personel sekolah yang memikul tanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian aktivitas di lingkungan institusi tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S Ali Imron: 159)

3. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum

Dalam menjalankan roda kepemimpinan, seorang kepala sekolah berkewajiban mengambil peran sentral dalam mengatur sekaligus mengawasi jalannya aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah. Peran tersebut bertindak sebagai indikator penentu bagi keberhasilan visi dan misi suatu lembaga pendidikan.

Kemampuan kepala sekolah dalam mengeksekusi fungsi manajerial ini secara efektif menjadi kunci utama terwujudnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah: 8)

Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa bahwa, supaya implementasi kurikulum berlangsung sesuai tujuan maka, terdapat beberapa peran kepala sekolah sebagai berikut :

1) Kepala Sekolah sebagai Pendidik (*Educator*)

Menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai educator merupakan pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab

²² Muhadzdzibah, Manap Somantri, and Puspa Djuwita. "Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Sman 2 Bengkulu Selatan." *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 11.5, 2017.

membina dan mengembangkan kompetensi guru, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Peran educator tidak hanya diwujudkan melalui pemberian arahan kepada guru, tetapi juga melalui pembinaan profesional, pelatihan, pemberian motivasi, pengembangan budaya belajar, serta evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah dituntut menjadi penggerak perubahan yang mampu memastikan seluruh warga sekolah memahami filosofi kurikulum, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta membangun budaya belajar yang kolaboratif.

Adapun indikator kepala sekolah sebagai educator meliputi:

a. Konsep Pendidikan dan Kurikulum Merdeka

Pemahaman terhadap konsep pendidikan dan Kurikulum Merdeka merupakan dasar utama dalam menjalankan peran kepala sekolah sebagai educator. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pengembangan kompetensi, karakter, serta pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu memahami filosofi Kurikulum Merdeka sekaligus

mengarahkan guru agar mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran.

Sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah memiliki tanggung jawab menyosialisasikan kebijakan Kurikulum Merdeka, membangun pemahaman bersama mengenai Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pemahaman yang baik terhadap konsep kurikulum akan memudahkan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Konsep tersebut sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar dan interaksi sosial. Penelitian Nabiila Tsuroyya Azzahra juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun pemahaman guru terhadap filosofi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.²³ Selain itu, penelitian Ari Susanto menunjukkan

²³ Nabiila Tsuroyya Azzahra, Septa Nur Laila Ali, dan M Yunus Abu Bakar, "Teori Konstruktivisme Dalam Dunia Pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no.2 (2025): 64-75, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.4762>.

bahwa kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah berperan penting dalam mengarahkan transformasi pembelajaran sesuai karakteristik Kurikulum Merdeka.²⁴

b. Pembinaan Guru dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Pembinaan guru merupakan proses pendampingan yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru. Pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui konsultasi, supervisi akademik, diskusi profesional, pendampingan penyusunan perangkat ajar, maupun pemberian umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, pembinaan guru diarahkan agar guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar, serta menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat profesionalisme guru.

²⁴ Ari Susanto, Eko Handoyo, dan Wasino, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Leader dan Educator Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin dan Mandiri Peserta Didik di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no.1 (2025).

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Data Driven Decision Making*, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran. Menurut Teguh Trianung, kepala sekolah perlu memanfaatkan data hasil belajar sebagai dasar dalam merancang pembinaan guru sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah.²⁵ Penelitian Safina Syabila Rahma dan Karwanto juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan berdasarkan analisis data mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan.²⁶

c. Komunitas Belajar (Kombel) dengan Program Leader

Komunitas belajar merupakan wadah kolaborasi antarpendidik yang bertujuan meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan berbagi pengalaman, diskusi, refleksi, serta penyelesaian masalah pembelajaran secara bersama-sama. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan budaya belajar kolaboratif sehingga guru dapat saling mendukung dalam mengembangkan inovasi pembelajaran.

²⁵ Teguh Trianung et al., "Optimalisasi Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Data Dalam Manajemen Strategis Sekolah Dasar," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no.2 (2025): 827-38, <https://doi.org/https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.6770>.

²⁶ Afina Syabila Rahma dan Karwanto, "Leadership Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Siswa (Studi Kasus Di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya)," *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 12 (2024): 790-98.

Program Leader menjadi salah satu bentuk implementasi komunitas belajar yang mendorong guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Melalui program tersebut, guru didorong untuk saling berbagi praktik baik (*best practice*), melakukan refleksi pembelajaran, serta mengembangkan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Konsep tersebut sesuai dengan teori *Professional Learning Community (PLC)* yang menekankan pentingnya kolaborasi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian Supardi U.S. dan Henhen Herdiana menunjukkan bahwa komunitas belajar mampu meningkatkan kompetensi profesional guru, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan budaya belajar yang mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.²⁷

d. Pelatihan Berkelanjutan dan Pengembangan Profesional Guru

Pelatihan berkelanjutan merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan pendidikan. Kepala sekolah memiliki

²⁷ Supardi U.S dan Henhen Herdiana, “Efektivitas Komunitas Belajar dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Sekolah,” *Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumihan dan Angkasa* 2, no 6 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/algoritma.v2i6.294>.

tanggung jawab memfasilitasi berbagai kegiatan pengembangan profesional, seperti *workshop*, *In House Training*, seminar, lokakarya, maupun pelatihan berbasis Platform Merdeka Mengajar.

Pengembangan profesional guru tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, tetapi juga membangun budaya belajar sepanjang hayat sehingga guru mampu beradaptasi terhadap perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi pendidikan.

Konsep tersebut sejalan dengan teori *Continuous Professional Development (CPD)* yang memandang pengembangan kompetensi guru sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus. Penelitian Nurhusna Kamil dan Erni Munastiwi menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.²⁸ sedangkan penelitian Wasino menjelaskan bahwa pengembangan profesional guru berpengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas sekolah.²⁹

²⁸ Nurhusna Kamil dan Erni Munastiwi, "Continuing Profesionalisme Development (CPD) sebagai Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru PAUD," *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 5 (2023): 261-69.

²⁹ Wasino et al., *Pendidikan Sekolah Di Era Perubahan* (Tasikmalaya: Filomedia Pustaka, 2025).

e. Budaya Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran

Budaya refleksi merupakan proses meninjau kembali pelaksanaan pembelajaran untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan strategi perbaikan. Kepala sekolah sebagai educator bertugas membangun budaya reflektif melalui kegiatan evaluasi bersama, diskusi profesional, maupun forum komunitas belajar sehingga guru terbiasa melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Evaluasi pembelajaran tidak hanya digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan mutu pembelajaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, refleksi menjadi bagian penting dari budaya mutu di sekolah.

Penelitian Lukman Solihin menjelaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya budaya refleksi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui refleksi yang dilakukan secara rutin, guru dapat mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.³⁰

³⁰ Lukman Solihin et al., *Menakar Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2025).

f. Pemberian Motivasi dan Sistem Penghargaan

Motivasi merupakan faktor yang memengaruhi semangat dan komitmen guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kepala sekolah sebagai educator memiliki peran memberikan motivasi melalui pembinaan, penghargaan atas prestasi, pemberian kesempatan mengikuti pelatihan, maupun dukungan terhadap inovasi pembelajaran yang dilakukan guru.

Selain motivasi, sistem penghargaan (*reward system*) menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja guru. Penghargaan yang diberikan secara objektif mampu menumbuhkan semangat kerja, meningkatkan kreativitas, serta mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensinya.

Menurut Ratu Husnunnadia dan Siti Masyithoh pemberian motivasi dan penghargaan secara berkelanjutan mampu meningkatkan komitmen, kepuasan kerja, dan profesionalisme guru sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.³¹

³¹ Ratu Husnunnadia dan Siti Masyithoh, "Pemberian Penghargaan Untuk Meningkatkan Kualitas Guru di Madrasah Ibtidaiyah : Tinjauan Strategi Kepala Sekolah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. May (2024): 104-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11180954Pemberian>.

g. Penciptaan Iklim Sekolah yang Kondusif

Iklim sekolah yang kondusif merupakan kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, serta mendukung proses pembelajaran. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab menciptakan budaya sekolah yang positif melalui komunikasi yang terbuka, kerja sama antarwarga sekolah, penghargaan terhadap keberagaman, serta penegakan disiplin yang bersifat edukatif.

Lingkungan sekolah yang kondusif akan meningkatkan motivasi guru dalam bekerja, memperkuat kolaborasi antarpendidik, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, iklim sekolah yang positif menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan transformasi pembelajaran.

Penelitian Febri Janatul Yuda dan Junaidi menjelaskan bahwa budaya sekolah yang positif mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan profesionalisme guru.³² Hasil penelitian Sarah Dalila Fitri juga menunjukkan bahwa iklim sekolah yang kondusif berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka karena mendorong kolaborasi,

³² Febri Janatul Yuda dan Junaidi, "Education Achievment: Journal of Science and Research," *Education Achievment: Journal of Science and Research* 6, no.1 (2025): 10-20. Hal.19

inovasi, dan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.³³

2) Kepala Sekolah Berperan Sebagai Manajer

Menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai manajer merupakan pemimpin yang bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Peran manajerial kepala sekolah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh program sekolah. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah dituntut mampu mengelola perubahan melalui perencanaan kurikulum yang matang, pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), pengelolaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Adapun indikator kepala sekolah sebagai manajer meliputi:

a. Perencanaan dan Sosialisasi Kurikulum

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab menyusun perencanaan implementasi Kurikulum Merdeka melalui penyusunan

³³ Sarah Dalila Fitri et al., "Implementasi Kebijakan Tentang Penciptaan Budaya dan Iklim yang Kondusif di Sekolah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* Volume 3, no. September (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/perspektif.v3i3.2690>.

program sekolah, penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan, serta penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum. Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain menyusun perencanaan, kepala sekolah juga berperan melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Sosialisasi bertujuan membangun pemahaman yang sama mengenai perubahan kurikulum, Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), pembelajaran berdiferensiasi, serta asesmen. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, implementasi kurikulum dapat berjalan lebih optimal karena seluruh warga sekolah memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap kebijakan yang diterapkan.

Menurut Muhammad Agus Kurniawan dan Khabibul Khoiri, perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, program, dan langkah operasional untuk mencapai mutu pendidikan secara efektif. Perencanaan yang matang akan mempermudah sekolah dalam mengelola perubahan serta

meningkatkan kualitas layanan pendidikan.³⁴ Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Lukman Solihin yang menyatakan bahwa sosialisasi Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan pemahaman konseptual guru serta kesiapan sekolah dalam melaksanakan perubahan kurikulum secara efektif.³⁵

b. Pengembangan Kurikulum (KOSP)

Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) merupakan salah satu bentuk implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang mengoordinasikan penyusunan KOSP dengan melibatkan guru, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, serta pemangku kepentingan lainnya agar kurikulum yang disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, visi sekolah, serta kebutuhan masyarakat.

KOSP disusun berdasarkan hasil analisis konteks sekolah sehingga memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai kondisi masing-masing. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu memimpin proses pengembangan

³⁴ Muhammad Agus Kurniawan dan Khabibul Khoiri, *Perencanaan Pendidikan* (Lampung: Agus Salim Press, 2022)

³⁵ Solihin et al., *Op.Cit.*, hlm.17-39

kurikulum secara kolaboratif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Menurut Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati, pengembangan kurikulum berbasis sekolah merupakan strategi pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengembangan KOSP juga menjadi bentuk implementasi otonomi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.³⁶

c. Pengorganisasian dan Pembagian Tugas

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta koordinasi antaranggota organisasi sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer bertanggung jawab menempatkan guru dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi yang dimiliki agar pelaksanaan program sekolah berjalan secara efektif.

Pembagian tugas yang jelas memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing individu sehingga pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berlangsung secara terstruktur. Dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), misalnya, kepala

³⁶ Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan pesantren* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).

sekolah perlu membentuk tim pelaksana, menunjuk koordinator program, serta mengatur mekanisme koordinasi antaranggota tim agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Menurut teori manajemen yang dikemukakan oleh Robbins, fungsi pengorganisasian bertujuan menetapkan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang melaksanakan, bagaimana tugas dikelompokkan, serta bagaimana mekanisme koordinasi dalam organisasi. Penelitian Muhammad Asfari Azemi. juga menjelaskan bahwa pembagian tugas berdasarkan kompetensi guru mampu meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka karena setiap guru melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan sekolah.³⁷

d. Pengelolaan Sumber Daya Sekolah

Pengelolaan sumber daya sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, maupun teknologi pendidikan. Pengelolaan tersebut dilakukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara

³⁷ Muhammad Asfari Azemi et al., "Manajemen dan Administrasi Kurikulum Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 8 Banjarmasin." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3 (2026): 399-354.

efektif untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Dalam menjalankan fungsi manajerial, kepala sekolah juga bertanggung jawab mengalokasikan anggaran sekolah secara transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan kompetensi guru, pengadaan sarana pembelajaran, serta pengembangan berbagai program pendidikan. Selain itu, kepala sekolah harus mampu memberdayakan guru melalui komunitas belajar sebagai sarana berbagi pengalaman, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan inovasi pembelajaran.

Penelitian Ade Siti Rosmuliawati. menunjukkan bahwa pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.³⁸ Penelitian Sofie Dhiya Maharani. juga menjelaskan bahwa komunitas belajar menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kompetensi guru secara kolaboratif tanpa bergantung sepenuhnya pada pelatihan eksternal.³⁹

³⁸ Ade Siti Rosmuliawati, Iim Waliman, dan Abdul Holik, "Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kinerja Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 6 (2026): 876-886.

³⁹ Sofie Dhiya Maharani et al., "Implementasi Program Kompetensi Guru Komunitas Belajar Dalam Meningkatkan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no.3 (2026): 14566-14574

e. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi pengendalian dalam manajemen pendidikan yang bertujuan memastikan seluruh program sekolah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui observasi, koordinasi, supervisi, diskusi, serta evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pembelajaran.

Hasil monitoring menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam melakukan evaluasi serta menentukan tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Syifa Firstriani Yunanto dan Kaniati Amalia, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala melalui kelompok belajar, pelatihan, dan *In House Training* mampu meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah.⁴⁰ Selain itu, Aswaruddin menjelaskan bahwa pengendalian dan pengawasan

⁴⁰ Syifa Firstriani Yunanto dan Kaniati Amalia, "Dalam Pengelolaan Kurikulum Merdeka di SMP Negeri Semarang," *e-Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 12, no.20 (2025): 121-33. Hal.130

merupakan elemen penting dalam manajemen organisasi pendidikan karena berfungsi memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta meminimalkan berbagai risiko dalam pelaksanaan program sekolah.⁴¹

3) Kepala sekolah sebagai Administrator

Menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai administrator memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh administrasi pendidikan secara sistematis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Administrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pencatatan atau pengarsipan dokumen, tetapi juga mencakup pengelolaan administrasi kurikulum, pembelajaran, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola sekolah. Pada implementasi Kurikulum Merdeka, peran administrator menjadi semakin penting karena kepala sekolah dituntut mampu menciptakan sistem administrasi yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan

Adapun indikator kepala sekolah sebagai administrator meliputi:

⁴¹ Aswaruddin et al., "Pengendalian dan Pengawasan dalam Manajemen Organisasi Pendidikan." *Jurnal Research and Education Studies* 4 (2024): 244-51.

a. Pengelolaan Administrasi Perangkat Pembelajaran

Pengelolaan administrasi perangkat pembelajaran merupakan salah satu tanggung jawab utama kepala sekolah sebagai administrator dalam menjamin terlaksananya proses pembelajaran secara sistematis. Kepala sekolah bertugas memastikan seluruh guru menyusun administrasi pembelajaran sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka, seperti Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), modul ajar, serta perangkat asesmen sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi dasar bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang terarah, terukur, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Selain melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi, kepala sekolah juga berperan memberikan arahan dan pendampingan kepada guru dalam menyusun perangkat pembelajaran agar sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Administrasi pembelajaran yang tersusun secara sistematis akan memudahkan guru dalam merancang strategi pembelajaran, melaksanakan asesmen, serta melakukan evaluasi terhadap capaian belajar peserta didik.

Menurut Sutrisno administrasi pendidikan merupakan suatu sistem yang mencakup pengelolaan kurikulum, kebijakan pendidikan, pengorganisasian sumber daya, serta pengawasan terhadap seluruh proses pendidikan. Administrasi pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan.⁴²

b. Administrasi Penilaian dan Pelaporan

Administrasi penilaian dan pelaporan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berfungsi sebagai sarana untuk mendokumentasikan perkembangan hasil belajar peserta didik sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas sekolah kepada orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan sistem penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, berkesinambungan, dan sesuai dengan prinsip asesmen dalam Kurikulum Merdeka.

Dalam pelaksanaannya, administrasi penilaian meliputi penyusunan instrumen asesmen, pengolahan hasil belajar, penyimpanan dokumen penilaian, serta penyusunan laporan perkembangan peserta didik. Sistem

⁴² Sutrisno et al., *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan* (Padang: Literasi Langsung Terbit, 2024).

pelaporan yang baik memungkinkan guru, orang tua, dan sekolah memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan kompetensi peserta didik sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Menurut Mardiaty administrasi penilaian merupakan bagian dari sistem evaluasi dan akuntabilitas pendidikan yang berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan informasi yang valid mengenai capaian belajar peserta didik. Sistem pelaporan yang dilaksanakan secara berkala juga memperkuat komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik.⁴³

c. Sistem Administrasi Berbasis PDCA

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah sebagai administrator perlu menerapkan sistem administrasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Model ini menekankan bahwa setiap program pendidikan harus diawali dengan perencanaan (*plan*), dilaksanakan sesuai rencana (*do*),

⁴³ Lona Mardiaty et al., "Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 42-51 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.820>.

dievaluasi hasil pelaksanaannya (*check*), kemudian dilakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan program (*action*).

Penerapan siklus PDCA membantu kepala sekolah mengelola administrasi pendidikan secara lebih sistematis karena setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik serta selalu dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Melalui sistem tersebut, administrasi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian mutu yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Sutrisno menjelaskan bahwa administrasi pendidikan memiliki fungsi utama berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang membentuk suatu sistem manajemen pendidikan secara utuh.⁴⁴ Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Anisah Febrianti yang menyatakan bahwa penerapan siklus PDCA mampu meningkatkan efektivitas manajemen mutu pendidikan karena setiap program selalu dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.⁴⁵

⁴⁴ Sutrisno et al., *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Op.Cit., hlm. 4-5

⁴⁵ Anisah Febrianti et al., "STRATEGI MANAJEMN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4 DI MAN 2 BANDAR

d. Pemanfaatan Teknologi Dalam Administrasi dan Pembelajaran

Perkembangan teknologi informasi menuntut kepala sekolah untuk mampu mengelola administrasi pendidikan secara digital. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan data sekolah. Digitalisasi administrasi memungkinkan proses penyimpanan data, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen akademik, serta komunikasi antarwarga sekolah dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Selain dalam administrasi, teknologi juga dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas teknologi, mendorong peningkatan literasi digital guru, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai karakteristik Kurikulum Merdeka.

Menurut Sudistiana kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformatif cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi pendidikan sehingga mampu menciptakan lingkungan sekolah yang inovatif,

mendorong guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta mempercepat transformasi digital di lingkungan sekolah. Pemanfaatan teknologi secara optimal tidak hanya meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan, tetapi juga mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada era digital.⁴⁶

4) Kepala sekolah sebagai Supervisor

Menurut Mulyasa, kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tanggung jawab membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan supervisi akademik yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai supervisor tidak hanya melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran, tetapi juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Perbaikan fasilitas sekolah merupakan salah satu bentuk dukungan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan.⁴⁷ Supervisi akademik bukan sekadar kegiatan penilaian terhadap kinerja guru, tetapi merupakan proses

⁴⁶ Vina Sudistiana et al., “Kepemimpinan Transformatif dalam Mewujudkan Sekolah Adaptif dan inovatif,” *Jurnal Of Innovative and Creativity* 6, no.1 (2026): 5854-59.

⁴⁷ Untung Khoiruddin dkk, “Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Citra SD Plus Sunan Ampel Rejomulyo Kota Kediri,” *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, Vol 5, no. 1, 2024: 51.

pembinaan profesional yang bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru sehingga mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah dituntut menerapkan supervisi yang bersifat kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Adapun indikator kepala sekolah sebagai supervisor meliputi:

a. Pelaksanaan Supervisi Akademik

Pelaksanaan supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan profesional yang dilakukan kepala sekolah untuk membantu guru meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi akademik dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan observasi, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut terhadap hasil supervisi. Melalui kegiatan tersebut kepala sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan maupun kelemahan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat memberikan bimbingan sesuai kebutuhan.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, supervisi akademik diarahkan pada peningkatan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan asesmen

diagnostik dan formatif, serta mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, supervisi akademik menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Menurut Ika Husnayati kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tugas membina, mengoordinasikan, dan mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Supervisi akademik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai proses pendampingan profesional yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.⁴⁸

b. Teknik Pendekatan Supervisi

Keberhasilan supervisi akademik sangat dipengaruhi oleh teknik dan pendekatan yang digunakan kepala sekolah. Teknik supervisi merupakan cara yang diterapkan dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran sekaligus memberikan pembinaan kepada guru. Pendekatan supervisi yang bersifat kolaboratif dan humanis akan menciptakan hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dan guru sehingga proses pembinaan berlangsung lebih efektif.

⁴⁸ Ika Husnayati et al., "PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR KEGIATAN," *Jurnal Medika Akademik* 2, no.6 (2024), <https://doi.org/10.62281>.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan melalui hubungan tatap muka antara kepala sekolah dan guru untuk membahas permasalahan pembelajaran secara mendalam. Pendekatan ini diawali dengan perencanaan bersama, dilanjutkan observasi pembelajaran, kemudian diakhiri dengan diskusi reflektif dan pemberian umpan balik sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran.

Menurut Kemendikbud dalam *Bahan Ajar Pengantar Supervisi Akademik*, supervisi klinis merupakan model supervisi yang berorientasi pada kebutuhan guru melalui hubungan profesional yang bersifat kolaboratif.⁴⁹ Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Muhammad Yunus yang menyatakan bahwa supervisi klinis mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut supervisi yang sistematis.⁵⁰

c. Supervisi Mendadak (*Sudden Supervision*)

Selain supervisi yang telah dijadwalkan, kepala sekolah juga dapat melaksanakan supervisi mendadak

⁴⁹ Kemendikbud, *Bahan Ajar Pengantar Supervisi Akademik* (Jakarta: Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, 2019).

⁵⁰ Muhammad Yunus et al., "Peran Supervisi Klinis Kepala Sekolah dalam Peningkatan," *Jurnal Of Education and Culture* 5, no.1 (2025): 26-33.

(*sudden supervision*). Supervisi mendadak merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan tujuan memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi pembelajaran yang sebenarnya di kelas. Melalui pendekatan ini, kepala sekolah dapat melihat secara langsung bagaimana guru melaksanakan pembelajaran dalam situasi yang alami sehingga hasil supervisi menjadi lebih autentik.

Pelaksanaan supervisi mendadak bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan guru, tetapi sebagai upaya memperoleh informasi yang akurat mengenai praktik pembelajaran sehingga kepala sekolah dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Dengan demikian, supervisi mendadak menjadi salah satu strategi pengendalian mutu pembelajaran yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara berkelanjutan.

Menurut Kemendikbud, supervisi akademik dapat dilakukan melalui kunjungan kelas, percakapan pribadi dengan guru, diskusi dengan teman sejawat, maupun pengumpulan informasi dari peserta didik untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan tersebut memberikan data yang komprehensif bagi kepala sekolah

dalam menyusun program pembinaan guru secara berkelanjutan.⁵¹

d. Dampak Supervisi Terhadap Kualitas Pembelajaran

Supervisi akademik memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran apabila dilaksanakan secara terencana, objektif, dan berkesinambungan. Melalui supervisi, guru memperoleh masukan mengenai strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran, pelaksanaan asesmen, serta pengembangan kompetensi profesional. Hasil supervisi juga menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam merancang program pembinaan, pelatihan, maupun pengembangan profesional guru.

Supervisi akademik memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran apabila dilaksanakan secara terencana, objektif, dan berkesinambungan. Melalui supervisi, guru memperoleh masukan mengenai strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran, pelaksanaan asesmen, serta pengembangan kompetensi profesional. Hasil supervisi juga menjadi dasar bagi kepala sekolah dalam merancang program pembinaan, pelatihan, maupun pengembangan profesional guru.

⁵¹ Kemendikbud, *Bahan Ajar Pengantar Supervisi Akademik*. Op.Cit., hlm. 4

Penelitian Erika Juliani Purba menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guru. Peningkatan kualitas pembelajaran tersebut secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya keaktifan peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, serta hasil belajar siswa.⁵²

B. Implementasi Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Kurikulum Merdeka

Secara kebahasaan, kata kurikulum mengadopsi istilah dalam bahasa Yunani, yakni *curir* yang memiliki arti pelari dan *curere* yang diterjemahkan sebagai berpacu. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang maknanya, kurikulum merupakan serangkaian program mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa di lembaga pendidikan untuk memperoleh pengakuan formal atau ijazah. Dalam cakupan yang lebih luas, kurikulum bertindak sebagai perangkat pembelajaran terstruktur yang berfungsi membentuk karakter individu agar memiliki perilaku yang terarah, kesadaran akan tanggung jawabnya, serta kemampuan berpikir yang matang.⁵³

⁵² Erika Juliani Purba et al., "Analisis Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Pembelajaran Guru Di SDN 101768 Tembung Dari Perspektif Guru." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2026): 1-9.

⁵³ *Ibid*, Hal. 34-37

Menurut Mulyasa di dalam bukunya, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum fleksibel yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2022/2023 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.⁵⁴ Menurut Marisa Merdeka belajar adalah salah satu program yang dilaksanakan untuk menciptakan suasana belajar yang Bahagia bagi peserta didik atau pendidik yang bertujuan untuk peserta didik dan pendidik serta orang tua bisa mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan, karena prinsip dari merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa adanya beban berat yang diakibatkan tuntutan pencapaian.⁵⁵

Sebagai cetak biru pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman baku yang memuat orientasi tujuan, kompetensi isi, serta bahan ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain berperan sebagai kompas instruksional, kurikulum juga mencakup serangkaian disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Penguasaan ragam materi tersebut esensial bagi siswa untuk memperkaya khazanah keilmuan serta mengoptimalkan pengalaman akademis mereka sepanjang proses persekolahan.

Dalam penerapannya, lembaga pendidikan memiliki keleluasaan penuh untuk mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan orientasi kebutuhan belajar siswa. Penyesuaian ini wajib

⁵⁴ Prof. Dr.H.E. Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Merdeka* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2023)

⁵⁵ Ika Wahyu Susiani. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Darur Rohmah Gandu Mlarak Ponorogo. *Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS)*. Vol 03, 2022.

mempertimbangkan kompetensi capaian peserta didik demi mendukung efektivitas pemulihan kualitas pembelajaran. Atas dasar tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait menawarkan tiga skema atau opsi pemberlakuan kurikulum di sekolah, yang meliputi instrumen Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, serta Kurikulum Merdeka.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al- alaq ayat 1-5 sebagai berikut :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq : 1-5)

2. Tujuan Kurikulum Merdeka

Menurut Pratt tujuan dari kurikulum dikemukakan sebagai berikut :

1. Hasil pembelajaran yang spesifik, terarah, dan dapat diamati harus menjadi sasaran dari kurikulum.
2. Tujuan kurikulum wajib selaras dengan sasaran kurikulum itu sendiri, yakni harus bisa dicapai serta konsisten dengan tujuan yang bersifat lebih umum.

3. Agar memberikan gambaran yang tegas kepada mereka yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program, tujuan harus didokumentasikan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas.
4. Kelayakan harus ditunjukkan oleh tujuan, artinya tujuan bukanlah kriteria yang bersifat wajib, melainkan harus sesuai dengan kondisi yang ada.
5. Tujuan harus bersifat fungsional, yang berarti merepresentasikan nilai guna bagi masyarakat maupun siswa.
6. Kegunaan tujuan kurikulum tercermin dari pemilihannya yang didasarkan pada nilai-nilai yang diakui.
7. Relevansi tujuan kurikulum sangat diperlukan, terutama apabila dilihat dari sudut minat serta kemampuan siswa, yang mencakup kemampuan latar belakang, ketertarikan, dan tingkat perkembangan mereka.⁵⁶

3. Implementasi Kurikulum Merdeka

Konsep implementasi secara sederhana didefinisikan sebagai bentuk tindakan atau pelaksanaan. Sedangkan menurut Browne istilah ini merujuk pada perluasan dari berbagai kegiatan yang saling menyesuaikan satu sama lain. Mengenai istilah kurikulum menurut Subandijah mengaitkannya dengan rute atau jarak yang mesti

⁵⁶ Siti Nuriyah I. M. Skripsi : *"Implementasi Kurikulum International Baccalaureate Dalam Pengembangan Kompetensi Siswa Di Mi Muslimat Nu Pucang Sidoarjo."* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022). Hal. 24

diselesaikan oleh pelari dari titik *start* hingga *finish*. Metafora ini mengindikasikan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah rentang waktu pembelajaran yang wajib dilewati siswa demi memperoleh apresiasi kelulusan berbentuk dokumen resmi seperti ijazah.

Sebagai wujud nyata dari pengalaman belajar siswa, penerapan kurikulum dilakukan dengan menekankan pada aspek kemudahan dan efisiensi komunikasi di lingkungan institusi pendidikan. Hal ini penting agar transformasi kebijakan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh manajemen sekolah, staf pengajar, pengawas, maupun karyawan administrasi. Lebih lanjut, implementasi berada dalam ruang lingkup tata kelola kurikulum yang utuh, di mana siklusnya bergerak secara dinamis dari penyusunan (*curriculum construction*), pengembangan (*curriculum development*), eksekusi lapangan (*implementation*), pengumpulan respons (*feedback*), pengecekan mutu (*evaluation*), sampai pada tahap adaptasi atau modifikasi (*modification*).⁵⁷

Berdasarkan pemikiran Mulyasa proses penerapan kurikulum terkonstruksi dari fase perencanaan, tahapan operasional, hingga proses penilaian atas keberhasilan pelaksanaannya. Gagasan tersebut sejalan dengan kerangka berpikir yang dipaparkan oleh Hamalik berikut ini:

⁵⁷ Yunita dkk, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar,' *Ambura Journal of Educational Management*, 4.1 (2023), pp. 16–25.

1. Fase Perencanaan: visi dan misi satuan pendidikan dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan tujuan secara tertulis.
2. Fase Implementasi: Tahapan ini menempatkan dokumen perencanaan sebagai tolok ukur atau kiblat dalam merealisasikan program. Untuk memastikan keberhasilannya, koordinasi dilakukan melalui pemberian arahan dan stimulus moral agar semua anggota tim dapat mengaktualisasikan potensi mereka secara maksimal sesuai porsi tugas dan kewajibannya.
3. Fase Evaluasi: Bagian ini dipahami sebagai proses peninjauan ulang guna menilai suatu program atau objek berdasarkan standar-standar baku yang telah ditetapkan. Melalui aktivitas penilaian ini, peneliti dapat menjaring dan menghimpun kumpulan data objektif maupun informasi yang relevan.